



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 6, No. 1, 2026, hlm.1— 9
ISSN 2685-0427 (online)

Pelatihan Teknis Pengelolaan Pekerjaan Fisik Dana Desa untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Lita Istiyanti^{1*}, Sri Kencanawaty², Hanifah Sabilla³

^{1,2,3}Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan, Jalan Mustafa Kemal No. 21,
Kalianda, Lampung, 35513, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: lita.ist_mt@yahoo.com.

artikel masuk: 09-06-2026; artikel diterima: 30-06-2026

Abstract: Village Funds are a strategic government policy instrument aimed at accelerating rural development and improving community welfare. In practice, a substantial portion of Village Funds is allocated to physical infrastructure development, which requires adequate technical capacity and proper governance by village officials. Limited technical understanding in managing physical works often results in low infrastructure quality and increases the risk of administrative errors and potential legal problems. This community service activity aimed to improve the quality of village infrastructure by strengthening the technical capacity of village officials in managing Village Fund-based physical development projects through technical training. The activity was conducted using a community service approach consisting of technical training, interactive discussions, and case studies related to village physical works. The training materials focused on basic technical planning, volume calculation, quality control, and administrative reporting of physical development activities. Evaluation of the activity was carried out using pre-test and post-test assessments to measure changes in participants' understanding. The results showed an improvement in participants' technical comprehension, with average scores increasing from approximately 58% in the pre-test to 83% in the post-test. High participant engagement during discussion sessions indicated strong relevance between the training materials and practical challenges faced by village officials. These results demonstrate that technical training is effective in supporting better village infrastructure quality and serves as a preventive effort to reduce potential legal risks in Village Fund management.

Keywords: Village Fund; Technical Training; Physical Works; Infrastructure Quality; Village Governance

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa

menjadi sumber pembiayaan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik desa. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sebagian besar Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, drainase, dan bangunan pelayanan publik, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Saragih et al, 2025).

Besarnya alokasi Dana Desa untuk pekerjaan fisik menuntut kemampuan teknis dan tata kelola yang memadai dari aparatur desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Namun, sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan kapasitas sumber daya manusia desa. Keterbatasan kompetensi aparatur desa menyebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya optimal dan berpotensi menimbulkan permasalahan administratif maupun teknis (Saragih et al, 2025); (Ginting & Wahyudi, 2026).

Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar aparatur desa tidak memiliki latar belakang teknis konstruksi, sementara mereka dituntut untuk mengelola pekerjaan fisik yang harus memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis, serta ketentuan regulasi yang berlaku. Beberapa studi menegaskan bahwa lemahnya pemahaman teknis aparatur desa dalam pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa sering berujung pada kesalahan perhitungan volume pekerjaan, ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan, serta lemahnya pengawasan mutu infrastruktur.

Permasalahan teknis tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan potensi munculnya masalah hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Kajian mengenai akuntabilitas dan kewenangan pemerintah desa menunjukkan bahwa kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan fisik Dana Desa sering menjadi dasar temuan audit dan berujung pada persoalan hukum, meskipun tidak selalu didorong oleh niat penyalahgunaan anggaran (Ashar & Rosnawati, 2025).

Selain itu, beberapa penelitian menyoroti bahwa pengelolaan Dana Desa selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan keuangan, sementara aspek teknis pekerjaan fisik belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Padahal, keberhasilan pembangunan infrastruktur desa sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan teknis, kualitas pelaksanaan konstruksi, serta efektivitas pengawasan lapangan .

Dalam pencegahan potensi permasalahan hukum, berbagai literatur menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan. Pengembangan kapasitas aparatur desa terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan Dana Desa, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur (Ra'is & Rini, 2024).

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat celah berupa minimnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara spesifik mengintegrasikan pelatihan teknis pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa dengan upaya pencegahan risiko hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pelatihan teknis pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa sebagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur desa sekaligus mitigasi potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaannya.

2. METODE

2.1 Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk **pelatihan teknis dan pendampingan pengelolaan pekerjaan fisik desa berbasis Dana Desa**. Pendekatan yang digunakan adalah **penguatan kapasitas (capacity building)** aparatur desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan menitikberatkan pada peningkatan pemahaman teknis pekerjaan fisik serta tata kelola pelaksanaan Dana Desa yang akuntabel dan sesuai regulasi. Pendekatan ini dipilih karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa merupakan faktor utama rendahnya efektivitas pengelolaan Dana Desa dan meningkatnya risiko permasalahan hukum; (Ralis & Rini, 2024; Saragih et al, 2025).

2.2 Lokasi dan Sasaran Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Aula Gedung Sultan Hotel yang berlokasi di Bandar Lampung dengan dasar pertimbangan dapat terjangkau oleh aparatur desa yang berdomisili pada Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Ketibung dan Kalianda. Mitra pengabdian merupakan aparatur pemerintah desa yang meliputi: 1) Aparatur pemerintah desa, 2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan 3) Perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan fisik desa.

Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada peran strategis mereka dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur .

2.3 Tahap Pelaksanaan Pengabdian

2.3.1 Identifikasi Permasalahan

Tahap awal dilakukan melalui diskusi dan observasi terhadap praktik pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa yang telah berjalan. Identifikasi difokuskan pada tingkat pemahaman teknis aparatur desa, pola pengelolaan pekerjaan fisik, serta potensi kesalahan teknis dan administratif yang berisiko menimbulkan permasalahan hukum.

2.3.2 Penyusunan Materi Pelatihan

Berdasarkan hasil identifikasi, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang bersifat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan aparatur desa. Materi pelatihan meliputi: 1) prinsip

pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa; 2) pemahaman gambar teknis sederhana ; 3) perhitungan volume pekerjaan ; 4) pengendalian mutu pekerjaan fisik, dan 5) administrasi serta pelaporan kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

2.3.3 Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan studi kasus pekerjaan fisik desa. Studi kasus diambil dari contoh kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang umum dibiayai melalui Dana Desa, sehingga peserta dapat memahami penerapan materi secara kontekstual.

2.4 Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pemahaman peserta. Metode evaluasi menggunakan pre-test yang diberikan sebelum pelatihan dan post-test yang diberikan setelah seluruh materi disampaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai perubahan tingkat pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa, sekaligus sebagai dasar penilaian keberhasilan kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Antusiasme Peserta Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan teknis pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme yang tinggi dari aparatur desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Hal ini terlihat dari kehadiran peserta yang konsisten sejak awal hingga akhir kegiatan, serta keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Pada sesi dialog interaktif, peserta secara aktif mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi di lapangan, seperti kesulitan memahami gambar teknis sederhana, keraguan dalam menentukan volume pekerjaan, serta kekhawatiran terhadap potensi temuan audit akibat kesalahan administrasi dan teknis. Antusiasme ini menunjukkan bahwa materi pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan aparatur desa dan menjawab persoalan praktis dalam pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa.

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa aparatur desa memiliki kebutuhan tinggi terhadap peningkatan kapasitas teknis, khususnya dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa, karena keterbatasan latar belakang teknis sering menjadi sumber utama permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa (Ginting & Wahyudi, 2026). Dengan demikian, tingginya partisipasi peserta mencerminkan kesadaran aparatur desa akan pentingnya penguatan kapasitas teknis sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola Dana Desa.

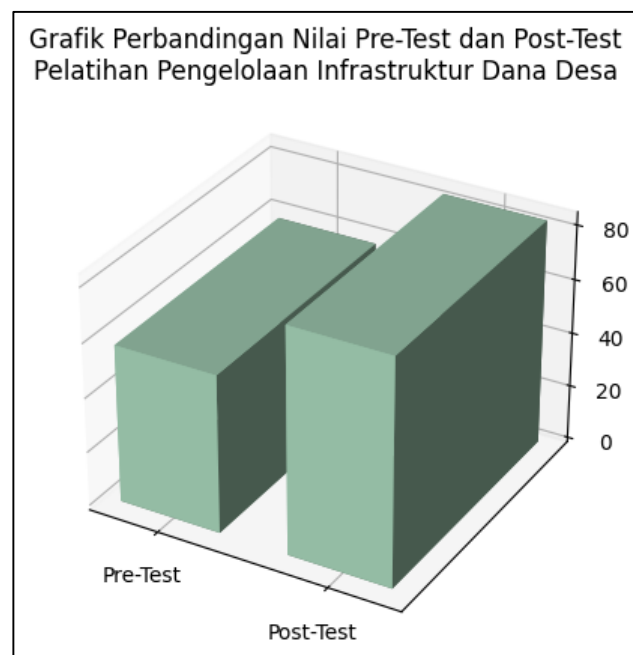
3.2 Hasil Evaluasi Pre – Test dan Post - Test

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, dilakukan evaluasi melalui pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah seluruh materi disampaikan. Evaluasi difokuskan pada pemahaman peserta terkait aspek teknis dan tata kelola pekerjaan fisik Dana Desa,

meliputi pemahaman dasar perencanaan teknis, pelaksanaan pekerjaan fisik, pengendalian mutu, serta administrasi dan pelaporan kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan setelah mengikuti pelatihan. Pada tahap pre-test, rata-rata tingkat pemahaman peserta berada pada kisaran 55–60%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek teknis pekerjaan fisik Dana Desa. Setelah pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta hingga mencapai kisaran 80–85%.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pelatihan teknis yang bersifat aplikatif dan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa secara efektif. Peserta tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mulai mampu mengaitkan materi pelatihan dengan praktik pengelolaan pekerjaan fisik yang mereka lakukan di desa masing-masing.



Gambar 1. Diagram Hasil Pre – Test dan Post - Test

3.3 Pembahasan Hasil Pelatihan

Peningkatan hasil post-test dibandingkan dengan pre-test menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan teknis yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Hasil ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur.

Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab juga mengindikasikan bahwa aparatur desa tidak hanya membutuhkan pemahaman administratif dan regulatif, tetapi juga pemahaman teknis praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Hal ini sejalan dengan kajian yang menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa selama ini cenderung lebih berfokus pada aspek administrasi keuangan, sementara aspek teknis pekerjaan fisik sering terabaikan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan kualitas infrastruktur dan risiko hukum.

Dengan meningkatnya pemahaman teknis aparat desa, diharapkan pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa dapat dilaksanakan secara lebih tertib, sesuai standar teknis, dan selaras dengan ketentuan regulasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan risiko kesalahan teknis dan administratif yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya temuan audit dan permasalahan hukum dalam pengelolaan Dana Desa.



Gambar 2. Dokumentasi Pembukaan oleh Sekdin DPUPR Lampung Selatan



Gambar 3. Antusiasme Kepala Desa dalam Kegiatan Pelatihan



Gambar 4. Antusiasme Kepala Desa agar Pelatihan Sejenis Diadakan Kembali



Gambar 5. Para Nara Sumber pada Kegiatan Pelatihan



Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan yang Berlangsung Tertib

3.4 Implikasi terhadap Tata Kelola dan Pencegahan Masalah Hukum

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis aparatur desa tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap upaya pencegahan permasalahan hukum. Aparatur desa yang memahami aspek teknis pekerjaan fisik secara lebih baik cenderung lebih berhati-hati dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Dengan demikian, pelatihan teknis pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa dapat dipandang sebagai langkah preventif yang strategis dalam meminimalkan potensi permasalahan hukum, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola Dana Desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan teknis pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Antusiasme peserta yang tinggi dalam sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan bahwa materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata aparatur desa dalam mengelola pembangunan infrastruktur. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap aspek teknis dan tata kelola pekerjaan fisik Dana Desa. Peningkatan kapasitas ini menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang lebih berkualitas, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga berpotensi meminimalkan risiko kesalahan teknis dan permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, direkomendasikan agar pelatihan teknis pengelolaan pekerjaan fisik Dana Desa dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis ini dengan sistem pendampingan desa, sehingga peningkatan kapasitas aparatur desa tidak hanya bersifat temporer, tetapi berkelanjutan. Selain itu, pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, seperti pendalaman perhitungan volume pekerjaan, pengendalian mutu konstruksi, dan penyusunan laporan kegiatan fisik, perlu dikembangkan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengurangi potensi permasalahan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ashar, B., & Rosnawati, E. (2025). *The Authority of Village Government in Village Fund Management [Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa]*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Ginting, E., & Wahyudi, A. (2026). Pengelolaan dan pengawasan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa baru. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 418-426. doi:<https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5035>

Intelman, M., & Idayati, F. (2024). Dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa , pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntans*, 13(8).
Ra'is, D., & Rini, Y. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa : analisa tren pengelolaan dana desa 2016-2024. *JADMENT: Journal of Administration & Development*, 1(2), 89-102. <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Sambas, M., & Saputro, G. (2024). Implementasi prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa sebagai instrumen ekonomi pembangunan. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 3(6), 439-447. Retrieved from <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>

Saragih et al. (2025). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua Kabupaten Serdang Begadai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 4(1), 39-45. doi:[https:// 10.31289/jiaap.v4i1.1782](https://10.31289/jiaap.v4i1.1782)

Sulistianingsih et al. (2022). Village fund management towards good governance as an effort to realize village community welfare. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKA*. doi:[https://doi.org/ 10.30999/jpkm.v12i2.2109](https://doi.org/10.30999/jpkm.v12i2.2109)

Tajudin et al. (2025). Accountability in the management of village funds under law No. 6 Of 2014 : an analysis of good governance implementation. *RECHTSVINDING*, 195-206. doi:[https://doi.org.10.59525/rechtsvinding.v3i2.1070](https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1070)